

NOTA - DINAS
No ^{up} /ND/XIX.MTR/01/2019

Kepada Yth : Tortama KN VI
Dari : Kepala Perwakilan Provinsi NTB
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2018
Lampiran : Satu Berkas
Tempat, Tanggal : Mataram, 17 Januari 2019

Menindaklanjuti Nota Dinas Tortama KN VI Nomor 14/ND/XIX/01/2019 tanggal 7 Januari 2019 perihal Permintaan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Tahun 2018 di Lingkungan AKN VI, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Tahun 2018 pada BPK Perwakilan Provinsi NTB. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

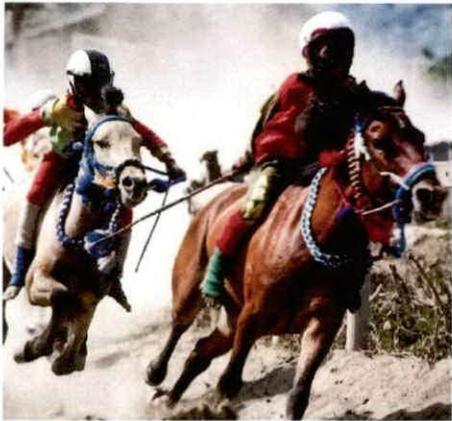
Kepala Perwakilan



Hery Purwanto
NIP 197104071996031002

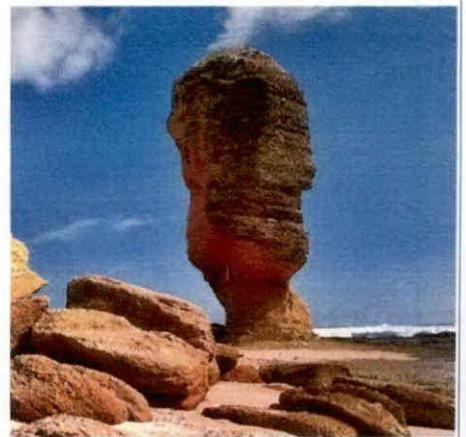
Tembusan Yth:

1. Anggota VI (tanpa laporan);
2. Kepala Direktorat PSMK.

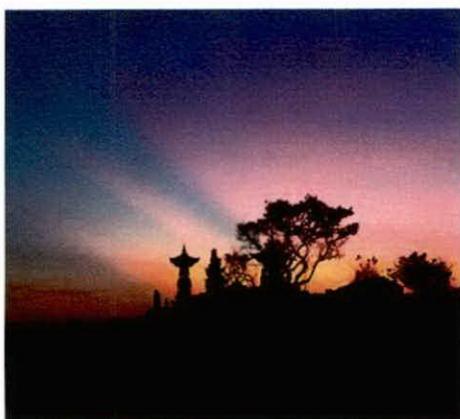
The logo of the Indonesian Ministry of Finance, featuring a Garuda bird with wings spread, holding a shield with the Indonesian flag colors. The text around the logo includes "TRI DHARMA", "ARTHASANTOSA", and "BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA".

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2018



BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamuálaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua

Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (LAKIP BPK) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. LAKIP BPK tidak hanya mengikat BPK sebagai lembaga, namun juga mengikat unsur-unsur pelaksana BPK RI. LAKIP BPK merupakan cerminan dari pencapaian kinerja unit-unit kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, yang salah satunya adalah BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebagai salah satu pelaksana BPK RI, BPK Perwakilan Provinsi NTB mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LK) BPK Perwakilan Provinsi NTB yang merupakan LK Unit Kerja Eselon II. LK Unit Kerja Eselon II berisi tentang tugas dan fungsi Perwakilan Provinsi NTB yang merupakan bagian unsur pelaksana Auditor Utama Keuangan Negara VI (AKN VI) dan sebagai pertanggungjawaban kinerja unit eselon II dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK. LK BPK Perwakilan Provinsi NTB adalah dasar penyusunan LK Pelaksana BPK (LK Unit Organisasi Eselon I).

Pada Laporan Kinerja (LK) BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2018 ini akan mengurai tentang perencanaan strategis dan pernyataan komitmen pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB dan akuntabilitas kinerja Perwakilan Provinsi NTB yang merupakan evaluasi atas pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.

Dalam pencapaian Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB, masih terdapat beberapa IKU yang belum memenuhi target yang tentunya akan menjadi perhatian dan evaluasi sehingga di masa yang akan datang dapat memenuhi seluruh target yang ada.

Demikian, semoga LK BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2018 ini dapat bermanfaat dan dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK.

Wabillahittaufig wal hidayah
Wassalamuálaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, 17 Januari 2019
Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB



Hery Purwanto
NIP 197104071996031002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Pemerintah menindaklanjuti dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Inpres tersebut antara lain mewajibkan setiap instansi pemerintah, tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan (LAKIP) tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK RI sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 13 yang antara lain menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja adalah ayat (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan ayat (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka BPK sebagai lembaga beserta unsur-unsur pelaksana BPK RI mempunyai kewajiban untuk menyusun LAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

B. Tugas dan Fungsi Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, antara lain mengatur bahwa BPK dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pelaksana BPK dan memiliki perwakilan di tiap provinsi. BPK Perwakilan Provinsi NTB merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan undang-undang tersebut, dimana Perwakilan Provinsi NTB adalah bagian unsur pelaksana Auditor Utama Keuangan Negara VI (AKN VI) dan perwujudan keberadaan BPK di Provinsi NTB. AKN VI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada Departemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dan Departemen Pendidikan Nasional serta

Kuangan Daerah dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB diatur dalam Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi NTB mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi NTB, Kota/Kabupaten di Provinsi NTB, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Adapun Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten yang merupakan wilayah BPK Perwakilan Provinsi NTB adalah sebagai berikut.

1. Provinsi NTB;
2. Kota Mataram;
3. Kabupaten Lombok Barat;
4. Kabupaten Lombok Tengah;
5. Kabupaten Lombok Timur;
6. Kabupaten Lombok Utara;
7. Kabupaten Sumbawa Barat;
8. Kabupaten Sumbawa;
9. Kabupaten Bima;
10. Kota Bima;
11. Kabupaten Dompu.

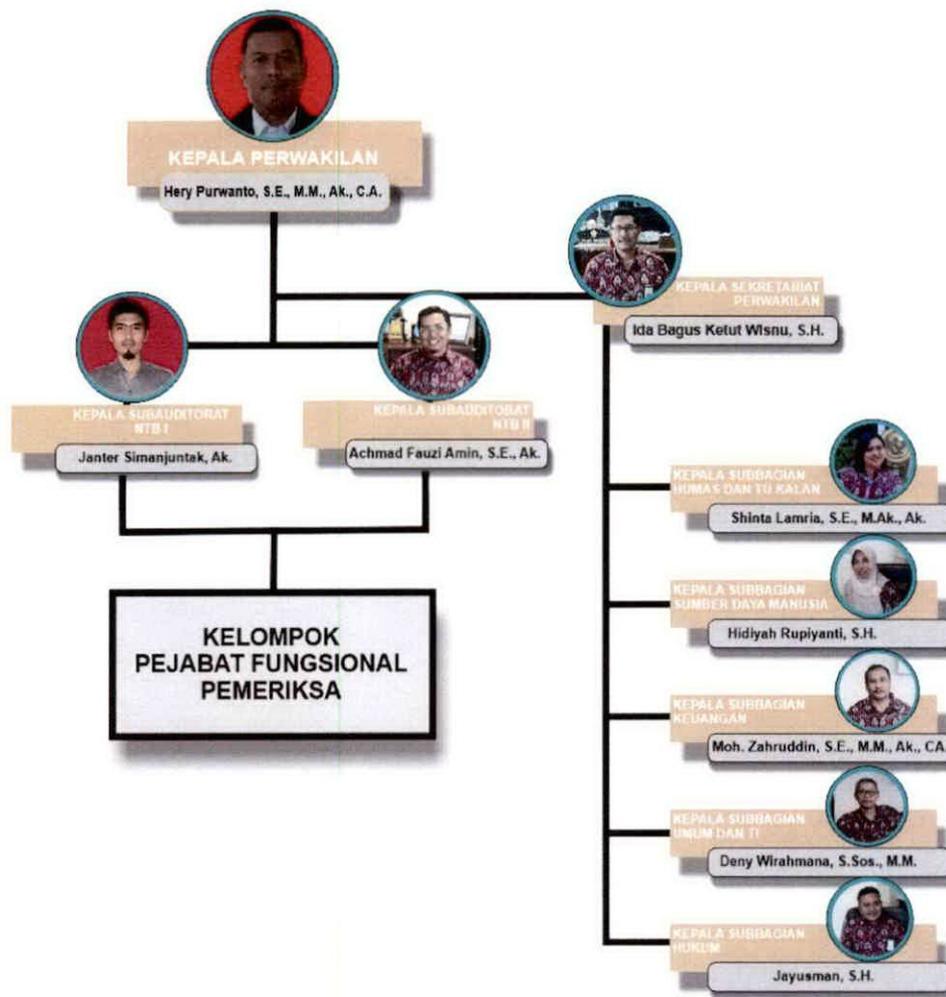
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, BPK Perwakilan Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi NTB dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi NTB berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTB;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
4. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi NTB;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;

9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi NTB, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi NTB kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada Instansi Penegak Hukum;
16. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
18. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB; dan
19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTB

BPK Perwakilan Provinsi NTB dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang membawahi satu orang Kepala Sekretariat Perwakilan, dua orang Kepala Subauditorat, lima orang Kepala Subbagian dan 40 orang Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa. Adapun Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTB per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTB

Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-VIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi NTB adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Auditama Keuangan Negara VI yang terdiri dari:

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTB. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- b. Pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB;

- c. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- d. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi NTB dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. Pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- f. Penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.

2. Subauditorat NTB I

Subauditorat NTB I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- a. Merumuskan rencana kegiatan;
- b. Mengusulkan tim pemeriksa;
- c. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- i. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- l. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.

3. Subauditorat NTB II

Subauditorat NTB II mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kota Mataram, Kabupaten Dompu, Kota Bima, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk :

- a. Merumuskan rencana kegiatan;
- b. Mengusulkan tim pemeriksa;
- c. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- i. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- l. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.

4. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Sumber Daya Manusia (SDM) BPK Perwakilan Provinsi NTB per 31 Desember 2018 berjumlah 101 orang yang terdiri dari satu orang Kepala Perwakilan, satu orang Kepala Sekretariat Perwakilan, dua orang Kepala

Subauditorat, lima orang Kepala Subbagian, 39 kelompok pejabat fungsional pemeriksa, 34 orang staf pendukung dan penunjang dan 19 orang tenaga kontrak.

Total Pagu Anggaran kegiatan BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp19.747.347.000,00 terdiri dari Pagu DIPA BPK Pusat sebesar Rp8.034.127.000,00 dan Pagu DIPA Sekretariat Jenderal sebesar Rp11.713.220.000,00, dengan realisasi sebesar Rp18.621.384.858,00 yang terdiri dari DIPA BPK Pusat sebesar Rp7.095.220.524,00 atau 88,31% dan DIPA Sekretariat Jenderal sebesar Rp11.526.164.334,00 atau 98,40%.

BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN
PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA(PKPK)
BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2016-2020 menetapkan visi, misi, nilai dasar, tujuan strategis dan sasaran strategis, yaitu:

1. Visi

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

2. Misi

- a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;
- b. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

3. Nilai Dasar

Dalam melaksanakan visi dan misinya, BPK Perwakilan Provinsi NTB menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut.

a. Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

b. Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

c. Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

4. Tujuan Strategis

Melalui pelaksanaan visi dan misinya, BPK Perwakilan Provinsi NTB berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut.

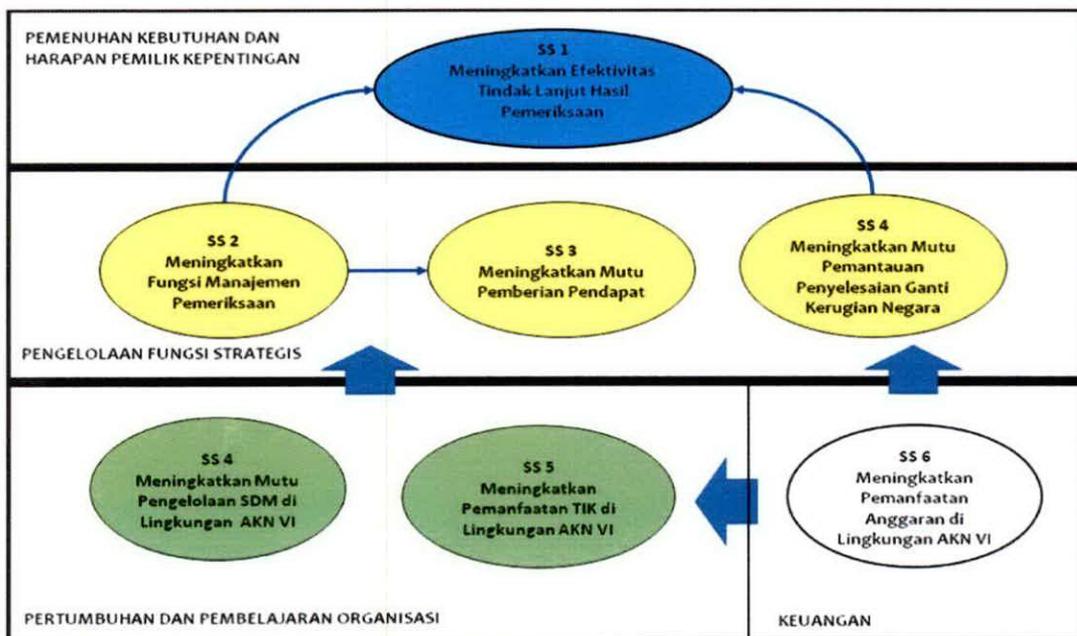
- a. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara;

- b. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

5. Sasaran Strategis

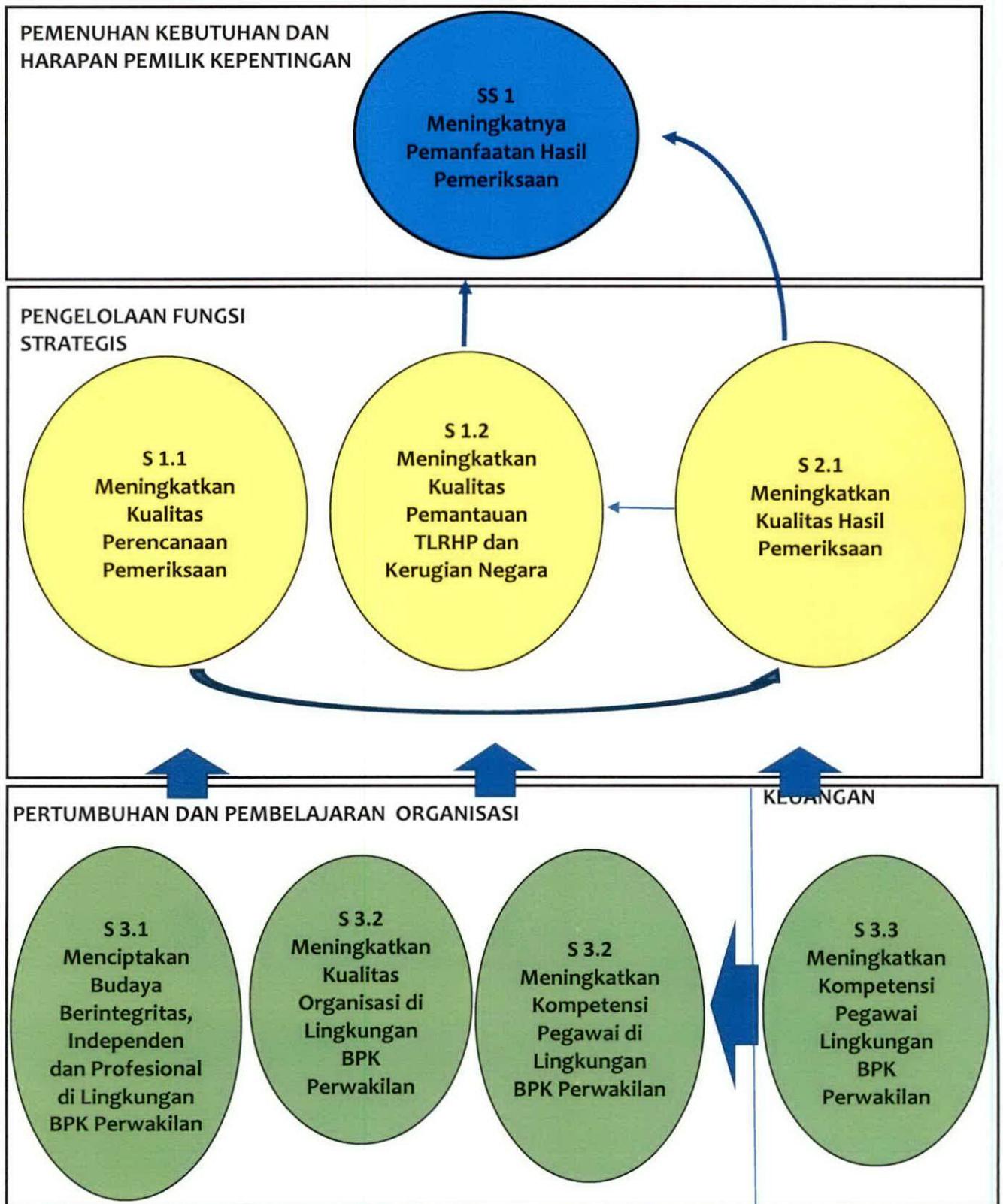
Dalam mendukung pencapaian visi, misi, nilai dasar, dan tujuan strategis BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan sasaran strategis (SS) yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan. Hal ini selaras dengan sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra BPK RI 2016-2020, yaitu SS 1 “Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan” dan SS 2 “Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Mutu”.

Untuk mencapai tujuan strategi tersebut, terdapat Peta Strategi BPK Eselon I (dhi. AKN VI) dan BPK Eselon II (dhi. Perwakilan). Adapun Peta Strategi BPK Eselon I (AKN VI) digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Peta Strategi BPK - Eselon I (AKN VI)

Sedangkan untuk perwakilan ditetapkan Peta Strategi BPK - Eselon II (Perwakilan) yang terdiri dari sembilan sasaran strategis (SS) yang digambarkan dalam bentuk sebagai berikut.



Gambar 3. Peta Strategis BPK Perwakilan

B. PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK RI menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tiap-tiap satuan kerja. Perwakilan BPK sebagai satuan kerja tersendiri mempunyai 27 IKU dan atas masing-masing IKU tersebut ditetapkan target-target pencapaian kinerjanya. IKU beserta target pencapaian kinerjanya dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon I.

BPK Perwakilan Provinsi NTB telah menetapkan target pencapaian kinerja pada masing-masing IKU dan dituangkan ke dalam PKPK BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi NTB selaku Pejabat Eselon II dan Tortama VI selaku Pejabat Eselon I pada tanggal 23 April 2018.

Berikut diuraikan Sasaran Strategis (SS), IKU dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2018 yang tertuang dalam PKPK.

Strategi	Indikator Kinerja	Target
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	85%
	IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	100%
	IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%
	IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%
	IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	22%
	IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP	80%
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
	IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	22
	IK 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1 Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%
	IK 2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,1
	IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%

Strategi	Indikator Kinerja		Target
	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen, dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	5,0
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0
	IK 3.1.1	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	A
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%
	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun	1
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best-Practice</i>	100%
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	93%
	IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/ Manajerial (Non Pemeriksa)	100%
7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2018

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN PROVINSI NTB
(EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA
BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB)

A. Pencapaian Skor BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2018

Pada tanggal 11 Januari 2019 bertempat di ruang pola gedung arsip lantai 4 Kantor Pusat BPK di Jakarta, dilaksanakan kegiatan minggu validasi dan penginputan data capaian kinerja semester II Tahun 2018 untuk memastikan data tersebut sesuai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan akurat. Dari kegiatan tersebut pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2018 sebagai berikut ini.

IKU	Uraian	Skor 2018	Target 2018	Capaian				
				2018	2017	2016	2015	2014
Skor Kinerja Perwakilan Provinsi NTB				74,95	98,37	97,06	94,43	92,90
SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan								
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	97.53	85%	82,90%	87,19%	87,49%	85,12%	75,50%
1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100	100%	100%	100%	0%	N/A	N/A
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara Pemberian Keterangan Ahli	101	100%	101%	100%	100%	N/A	N/A
1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	100	1	1	1	1	2	2
S 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan								
1.1.1	Tingkat implementasi strategi Pemeriksaan	105	90%	100%	95%	85%	N/A	N/A
1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	14.68	22%	3.23%	30%	22,73%	4	4
1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	0.00	80%	0%	-	73,33%	N/A	N/A
S 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara								
1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	100	22	22	22	11	22	22
1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100	100%	100%	50%	0%	100%	100%

IKU	Uraian	Skor 2018	Target 2018	Capaian				
				2018	2017	2016	2015	2014
S 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan								
2.1.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan dan Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100	100%	100%	100%	100%	QC : N/A QA : 100%	QC : N/A QA : 100%
2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	105	4,10	4,67	4,58	100%	N/A	N/A
2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	0,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
S 3.1 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan								
3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	69,60	5,00	3,48	N/A	N/A	N/A	N/A
3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	94,20	5,00	4,71	-	-	-	-
3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100	100%	100%	100%	-	-	-
S 3.12 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan								
3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	88,89	A	BB	BB	A	N/A	N/A
3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	105	80%	86,74%	82,72%	92,31%	N/A	N/A
3.2.3	Jumlah Usulan Best-Practice	100	1	1	1	0%	N/A	N/A
3.2.4	Tingkat Penerapan Best-Practice	100	100%	100%	-	0%	N/A	N/A
3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100	100%	100%	100%	95,84%	N/A	N/A
3.2.6	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	105	2	6,4	5,4	3,80	2,80	2,3
3.2.7	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100,15	93%	93,14%	93,26%	91,59%	91,21%	87,19%
S 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan								
3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100	100%	100%	94,74%	87,50%	96,88%	89,29%
3.3.2	Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)	100	100%	100%	85,71%	94,44%	82,72	86,63 jam
S 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan								
3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	0	85%	0%	80,48%	88,25%	94,28%	95,32%

Tabel 2. Skor pencapaian kinerja tahun 2014 s.d. 2018

Secara umum terjadi peningkatan dalam capaian target IKU selama 4 tahun terakhir. Di tahun 2018 skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB baru mencapai 74,95. Skor tahun 2018 ini belum memperhitungkan realisasi ke 3 indikator

indikator kinerja (1.1.1, 1.1.3, dan 3.4.1), dikarenakan belum mendapat hasil penilaian dari Biro Keuangan dan EPP serta tidak terpenuhinya IK 1.1.2 Rasio jumlah LHP kinerja terhadap seluruh LHP dikarenakan kondisi *force majeure* / gempa bumi yang terjadi selama 4 bulan, mulai bulan Juli s.d. Oktober. BPK Perwakilan Provinsi NTB akan berupaya meningkatkan skor capaian IKU ditahun-tahun berikutnya.

IKU	Uraian	Perbandingan Realisasi 2018 dengan Target 2018	Target 2018	Capaian				
				2018	2017	2016	2015	2014
Skor Kinerja Perwakilan Provinsi NTB				74,95	98,37	97,06	94,43	92,90
SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan								
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	97.53%	85%	82,90%	87,19%	87,49%	85,12%	75,50%
1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	0%	N/A	N/A
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara Pemberian Keterangan Ahli	101%	100%	101%	100%	100%	N/A	N/A
1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	100%	1	1	1	1	2	2
S 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan								
1.1.1	Tingkat implementasi strategi Pemeriksaan	111,11%	90%	100%	95%	85%	N/A	N/A
1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	14.68%	22%	3.23%	30%	22,73%	4	4
1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	0%	80%	0%	-	73,33%	N/A	N/A
S 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara								
1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	100%	22	22	22	11	22	22
1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	50%	0%	100%	100%
S 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan								
2.1.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan dan Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	QC : N/A QA : 100%	QC : N/A QA : 100%

IKU	Uraian	Perbandingan Realisasi 2018 dengan Target 2018	Target 2018	Capaian				
				2018	2017	2016	2015	2014
2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	113,9%	4,10	4,67	4,58	100%	N/A	N/A
2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
S 3.1 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan								
3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	69,60%	5,00	3,48	N/A	N/A	N/A	N/A
3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	94,20%	5,00	4,71	-	-	-	-
3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%	100%	-	-	-
S 3.12 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan								
3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan		A	BB	BB	A	N/A	N/A
3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	108,43%	80%	86,74%	82,72%	92,31%	N/A	N/A
3.2.3	Jumlah Usulan Best-Practice	1	1	1	1	0%	N/A	N/A
3.2.4	Tingkat Penerapan Best-Practice	100%	100%	100%	-	0%	N/A	N/A
3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100%	100%	95,84%	N/A	N/A
3.2.6	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	3,45	2	6,4	5,4	3,80	2,80	2,3
3.2.7	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100,15%	93%	93,14%	93,26%	91,59%	91,21%	87,19%
S 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan								
3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	94,74%	87,50%	96,88%	89,29%
3.3.2	Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (non pemeriksa)	100%	100%	100%	85,71%	94,44%	82,72	86,63 jam
S 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan								
3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	0%	85%	0%	80,48%	88,25%	94,28%	95,32%

Tabel 3. Pencapaian IKU dalam Target Tahun 2018

Pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB di tahun 2018 secara umum telah sesuai dengan target lima tahunan. Banyak terdapat perubahan

variabel dalam sasaran strategis kinerja sehingga banyak variabel yang tidak terdapat dalam sasaran strategis kinerja tahun sebelumnya. Periode 2014-2015 memuat sembilan sasaran strategis, periode 2016-2017 memuat tujuh sasaran strategis dan periode 2018 memuat delapan sasaran strategis.

A. **SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan**

Sasaran Strategis ini bertujuan agar BPK mampu memberikan rekomendasi bermutu yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. SS ini juga berupaya untuk meningkatkan efektivitas kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan BPK, terutama dalam kaitannya untuk meningkatkan dampak hasil pemeriksaan BPK.

Sasaran strategis 1 diukur melalui lima IKU yaitu:

- IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
- IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH;
- IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negaradan Pemberian Keterangan Ahli;
- IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditaa Revbang.

1. **IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan**

Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan kepada entitas yang diperiksa periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak 3.339 dengan rincian sebagai berikut.

No	Status Tindak Lanjut	Jumlah	Persentase
1	Selesai ditindaklanjuti	2.764	82,78%
2	Masih dalam proses/Belum selesai ditindaklanjuti	540	16,17%
3	Belum ditindaklanjuti	31	0,93%
4	Tidak dapat ditindaklanjuti	4	0,12%
Jumlah rekomendasi yang disampaikan		3,339	100%

Tabel 4 Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Auditee pada BPK Perwakilan Provinsi NTB mencapai 82,90% dari target yang ditetapkan sebesar 85%. IKU 1.1 belum mencapai target dikarenakan terdapat beberapa hambatan

yaitu masih ada entitas yang kurang aktif dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pencapaian tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 4,29% dari tahun sebelumnya.

IKU	Skor Tahun 2018	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun		
			2018	2017	2016
1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	97,53	85%	82,90%	87,19%	87,49%

Tabel 5 Perbandingan Capaian IKU 1.1 Tahun 2018, 2017, dan 2016

Semester I Tahun 2018 dilaksanakan kegiatan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sampai dengan Semester I Tahun 2018 pada tanggal 11 s.d. 13 Juli 2018. Sedangkan untuk semester II Tahun 2018 kegiatan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sampai dengan Semester II Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 12 Desember 2018.



Gambar 4 Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I 2018



Gambar 5 Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester II 2018

2. IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH

IKU 1.2 ini merupakan IKU bonus. Sampai dengan berakhirnya Semester II Tahun 2018, belum ada penyampaian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana ke IPH. Sehingga realisasinya dianggap sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

3. IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negeradan Pemberian Keterangan Ahli

IKU ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku kepentingan untuk melakukan perhitungan kerugian negara/daerah (yang dinyatakan memenuhi syarat oleh BPK) dan mengukur sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku kepentingan terkait Pemberian Keterangan Ahli. Selama tahun 2018, ada 2 permintaan penghitungan kerugian negara dari Polres Lombok Utara dan Kejari Lombok Tengah. 2 Permintaan ini kemudian diteruskan ke Auditorat Utama Investigasi (AUI), yang mana Perwakilan tidak mendapatkan informasi kelanjutannya.

Di tahun 2018 ini, terdapat pemberian keterangan ahli atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Langko, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah TA 2015 di Mataram. Sehingga realisasi dari IKU ini adalah 101% yang mana melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

4. IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang

IKU ini menunjukkan tingkat produktivitas AKN terkait pelaksanaan tugas dalam hal memberikan bahan pertimbangan dan bahan pendapat BPK kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara.

Perwakilan NTB telah mengirimkan satu usulan bahan pendapat kepada Ditama Revbang melalui Nota Dinas Nomor 312/ND/XIX.MTR/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dengan judul Pembinaan dan pengawasan keuangan desa. Realisasi tersebut telah memenuhi target 2018 sebesar 1. Sesuai dengan jawaban Nota Dinas dari Direktorat EPP Nomor 703/ND/XII.2/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 bahwa usulan bahan pendapat tersebut diterima sebagai capaian IKU sehingga bahan pendapat yang diterima sebagai capaian IKU sebesar satu bahan pendapat.

Perbandingan capaian Tahun 2018 dengan capaian Tahun 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

IKU	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun		
			2018	2017	2016
1.4Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1	1

Tabel 6 Perbandingan Capaian IKU 1.4 Tahun 2018, 2017 dan 2016

B. S 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Manajemen pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan strategis, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan NTB. Melalui Strategi (S) ini, BPK Perwakilan NTB melakukan pengendalian mutu pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, kode etik pemeriksa, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Strategi ini juga mencakup upaya peningkatan lingkup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Melalui pelaksanaan pemeriksaan yang terintegrasi, BPK berkomitmen untuk meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan agar lebih efisien dan efektif melalui pengelolaan biaya pemeriksaan yang optimal dan pemanfaatan teknologi informasi. Pemeriksaan yang dikelola dengan baik akan memberikan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. S 1.1 diukur melalui tiga IKU sebagai berikut.

- IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan;

- IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP;
- IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP.

1. IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan

Pada tahun 2018 ini, BPK Perwakilan Provinsi NTB telah melakukan dua kali revisi RKP. Revisi ke 1 diajukan pada tanggal 8 Agustus 2018 sesuai dengan nota dinas Kepala Perwakilan nomor 286/ND/XIX.MTR/08/2018.

Jumlah LHP yang diterbitkan pada Tahun 2018 yakni sebanyak 31 LHP dan sesuai dengan target yang ditetapkan. LHP tersebut terdiri dari 11 LHP LKPD, 1 LHP Kinerja dan 20 LHP DTT.

Adapun dokumentasi penyerahan LHP sebagai berikut.



Gambar 6 Penyerahan LHP LKPD TA 2017



Gambar 7 Penyerahan LHP DTT (Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2017)



Gambar 8 Penyerahan LHP Kinerja dan PDTT

Realisasi tingkat konsistensi antara rencana pemeriksaan dan pelaksanaan tahun 2018 masih menunggu nilai dari EPP, sehingga belum dapat diketahui apakah IK ini telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 90% atau tidak.

2. IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh LHP

Skor IK 1.1.2 pada Tahun 2018 adalah sebesar 14,68 karena hanya mampu merealisasikan 1 LHP Kinerja sesuai dengan revisi target yang ditetapkan

yaitu 1 LHP Kinerja. Revisi target dilakukan karena kondisi NTB pada triwulan III mengalami bencana alam berupa gempa. Di tahun 2018 realisasi rasio jumlah LHP kinerja terhadap seluruh LHP sebesar 3,23% dibawah target yang ditetapkan yaitu 22%.

3. IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP

IKU ini menunjukkan tingkat akurasi dan konsistensi penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh satker pemeriksaan. Sesuai dengan arahan Badan, LHP tidak boleh mengandung kesalahan (*Zero defect*) maka LHP harus 100% akurat.

Realisasi tingkat evaluasi LHP tahun 2018 masih menunggu nilai dari EPP, sehingga belum dapat diketahui apakah IK ini telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 80% atau tidak.

C. S 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

1. IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

IK ini menunjukkan tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan BPK No.2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

Realisasi tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun 2018 adalah sebesar 100% yang mana telah memenuhi target 2018 sebesar 100%.

Semester I Tahun 2018 dilaksanakan kegiatan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sampai dengan Semester I Tahun 2018 pada tanggal 11 s.d. 13 Juli 2018. Sedangkan untuk semester II tahun 2018 kegiatan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sampai dengan Semester II Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 12 Desember 2018.

Realisasi IK 1.2.2 jumlah laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara tahun 2018 telah mencapai target yaitu sebanyak 22 laporan dari target 2018 sebesar 22.

3. IK 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

Penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara oleh Auditorat/Perwakilan ke Dit. EPP adalah dalam rangka penyusunan bahan IHPS. Penyampaian yang dimaksud adalah penyampaian laporan secara fisik dan melalui input ke SIKAD

Realisasi ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara ke Ditama Revbang tahun 2018 sebesar 100% dimana telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 100%.

D. S 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

1. IK 2.1.1 Pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan dan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan

IK ini menunjukkan sejauh mana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Tahun 2018 pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) pemeriksaan sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. Perbandingan capaian Tahun 2018 dengan capaian Tahun 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

IKU	Skor Tahun 2018	Target Tahun 2018	Capaian Tahun		
			2018	2017	2016
2.1.1 Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100	100%	100%	100%	100%

Tabel 7 Perbandingan Capaian IK 2.1.1 Tahun 2018, 2017 dan 2016

Selama tiga tahun berturut-turut target Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan telah terpenuhi.

2. IK 2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK

IK ini bertujuan untuk mengukur kinerja pemeriksa melalui aspek perilaku dalam menerapkan nilai-nilai dasar organisasi BPK dan kualitas yang dipraktikkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. IK ini diukur berdasarkan persepsi auditee melalui survei tingkat kepuasan.

Dimensi yang diukur mencakup Integritas, Independensi dan Profesionalisme.

Realisasi indeks kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK tahun 2018 sebesar 4,67 yang mana telah melebihi target tahun 2018 sebesar 4,10.

3. IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

Ketepatan waktu penyampaian hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator dari efektivitas pelaksanaan pemeriksaan. Ketepatan waktu penyampaian LHP untuk pemeriksaan keuangan diatur dengan Undang-undang No.15 Tahun 2004, sementara untuk pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu didasarkan pada perencanaan penyelesaian pemeriksaan yang dinyatakan dalam P2.

Realisasi ketepatan waktu penyampaian LHP tahun 2018 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.



Gambar 11 Penyerahan LHP LKPD TA 2017

4. IK 2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK

IK 2.1.4 ini merupakan IKU bonus. Sampai dengan berakhirnya Semester II Tahun 2018, belum ada LHP BPK yang digugat. Sehingga realisasinya dianggap sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

E. S 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan

1. IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK

IK Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK adalah penilaian dari Biro SDM. Realisasi di tahun 2018 sebesar 3,48 dimana belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 5.

2. IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IK Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK adalah hasil penilaian dari Biro SDM. Realisasi IK 3.1.2 di tahun 2018 sebesar 4,71 dimana belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 5.

3. IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin

IK Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin adalah penilaian dari Biro SDM. Realisasi di tahun 2018 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%.

F. S 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan

1. IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan

IK ini bertujuan untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker. Realisasi hasil evaluasi Itama atas akuntabilitas kinerja perwakilan tahun 2018, dinilai BB dimana belum memenuhi dengan target tahunan senilai A.

2. IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

IK tentang Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Realisasi tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi di tahun 2018 sebesar 86,74%. Realisasi tersebut telah mencapai target tahun 2018 sebesar 80%.

3. IK 3.2.3 Jumlah Usulan Best-Practice

IK ini mengukur tingkat penyusunan *best practice* pada satker-satker BPK yang dapat mendorong peningkatan optimalisasi pelaksanaan tugas pekerjaan. Pada tahun 2018 persentase penyusunan *best-practice* tidak

3.2.3 ini telah terealisasi sebesar 1 dengan usulan *best practice* "Mengenalkan BPK secara luas melalui kegiatan Car Free Day (CFD)" dan telah disetujui oleh PSMK sesuai nota dinas nomor 849/ND/XII.1/12/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang mana telah memenuhi target tahun 2018 sebesar 1.

4. IK 3.2.4 Tingkat Penerapan Best-Practice

IK ini bertujuan untuk mengukur tingkat penyebaran *best practice* pada satker-satker BPK yang dapat mendorong peningkatan optimalisasi pelaksanaan tugas pekerjaan. IK ini telah terealisasi sebesar 1 dengan menerapkan Best Practice "Pemanfaatan Portal Perwakilan Provinsi NTB dalam Pengelolaan dan Penyimpanan KKP", yang mana telah memenuhi target tahun 2018 sebesar 100%.

5. IK 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja

IK ini bertujuan untuk mendorong unit kerja/satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, laporan triwulanan dan laporan kinerja secara tepat waktu.

Realisasi ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan, laporan triwulanan dan laporan kinerja tahun 2017 adalah sebesar 100% dimana telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%.

6. IK 3.2.6 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan

IK ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK RI, memperoleh dukungan dari media massa dalam menyebarkan hasil pemeriksaan BPK RI secara jelas dan akurat kepada masyarakat, dan meningkatkan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dengan media massa.

Pada tahun 2018 realisasi jumlah media relation yang dilaksanakan adalah sebesar 6,4 dimana melebihi target tahunan yang ditetapkan yaitu sebesar 2.

Media Relation yang dilaksanakan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut.

- a. Siaran Pers "Penyerahan LHP atas LKPD Prov NTB TA 2017" yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2018.
- b. Media Workshop dengan tema "Penyerahan LHP atas LKPD se-Provinsi NTB TA 2017" yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2018. Acara Media Workshop ini mengundang rekan-rekan dari media cetak seperti Lombok Post, Suara NTB, Radar Lombok. Media elektronik seperti TVRI, TV9, Lombok TV, Mataram News, RRI Mataram, Global FM, Inews TV dan media online seperti Garda Asakota, Suara NTB.com.

3.2.3 ini telah terealisasi sebesar 1 dengan usulan *best practice* "Mengenalkan BPK secara luas melalui kegiatan Car Free Day (CFD)" dan telah disetujui oleh PSMK sesuai nota dinas nomor 849/ND/XII.1/12/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang mana telah memenuhi target tahun 2018 sebesar 1.

4. IK 3.2.4 Tingkat Penerapan Best-Practice

IK ini bertujuan untuk mengukur tingkat penyebaran *best practice* pada satker-satker BPK yang dapat mendorong peningkatan optimalisasi pelaksanaan tugas pekerjaan. IK ini telah terealisasi sebesar 1 dengan menerapkan Best Practice "Pemanfaatan Portal Perwakilan Provinsi NTB dalam Pengelolaan dan Penyimpanan KKP", yang mana telah memenuhi target tahun 2018 sebesar 100%.

5. IK 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja

IK ini bertujuan untuk mendorong unit kerja/satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, laporan triwulanan dan laporan kinerja secara tepat waktu.

Realisasi ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan, laporan triwulanan dan laporan kinerja tahun 2017 adalah sebesar 100% dimana telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%.

6. IK 3.2.6 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan

IK ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK RI, memperoleh dukungan dari media massa dalam menyebarkan hasil pemeriksaan BPK RI secara jelas dan akurat kepada masyarakat, dan meningkatkan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dengan media massa.

Pada tahun 2018 realisasi jumlah media relation yang dilaksanakan adalah sebesar 6,9 dimana melebihi target tahunan yang ditetapkan yaitu sebesar 2.

Media Relation yang dilaksanakan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut.

- a. Siaran Pers "Penyerahan LHP atas LKPD Prov NTB TA 2017" yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2018.
- b. Media Workshop dengan tema "Penyerahan LHP atas LKPD se-Provinsi NTB TA 2017" yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2018. Acara Media Workshop ini mengundang rekan-rekan dari media cetak seperti Lombok Post, Suara NTB, Radar Lombok. Media elektronik seperti TVRI, TV9, Lombok TV, Mataram News, RRI Mataram, Global FM, Inews TV dan media online seperti Garda Asakota, Suara NTB.com.



Gambar 12 Media Workshop tanggal 28 Mei 2018

- c. Siaran Pers "Penyerahan LHP atas LKPD TA 2017 Kabupaten/Kota se-NTB " yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2018.
- d. Goes to School di SMKN 1 Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan mengundang 7 SMA/K di Kabupaten Lombok Tengah dilaksanakan pada tanggal 12 September 2018. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan BPK kepada siswa SMA/K dan memberikan informasi mengenai tugas pokok, peran, dan fungsi BPK yang dikemas secara menarik, yaitu dengan pemaparan materi dan tanya jawab, serta menggunakan sarana permainan agar dapat menarik minat siswa. Kegiatan ini dihadiri oleh 150 siswa dan guru pendamping.



Gambar 13 BPK Goes to School – penyampaian materi oleh Kepala Perwakilan



Gambar 14 BPK Goes to School –seluruh panitia dan peserta

- e. Media Workshop dengan tema "Dana Desa" yang diselenggarakan pada tanggal 4 September 2018. Acara Media Workshop ini mengundang rekan-rekan dari media cetak seperti Lombok Post, Suara NTB, Radar Lombok. Media elektronik seperti TVRI, TV9, Lombok TV, Mataram News, RRI Mataram, Global FM, Inews TV dan media online seperti Garda Asakota, Suara NTB.com.



Gambar 15 Media Workshop Dana Desa 4 September

- f. Public Awareness @CFD dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2018. Tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Kota Mataram dan sekitarnya mengerti serta mengenal BPK, mengedukasi masyarakat luas, dan sebagai tolak ukur atas kegiatan tahun lalu 2016 dan 2017. Kegiatan ini dikemas secara menarik, yaitu dengan penyebaran 150 kuesioner ke berbagai segmen masyarakat sekitar, penyediaan booth untuk sarana tanya jawab, serta menggunakan sarana permainan agar dapat menarik minat masyarakat.



Gambar 16 Public Awareness @CFD–seluruh panitia



Gambar 17 Public Awareness @CFD–penyebaran kuesioner ke masyarakat sekitar

- g. Media Visit ke media cetak Lombok Post pada tanggal 12 November 2018. Tujuan dilaksanakannya media visit ini adalah untuk meningkatkan kerjasama BPK Perwakilan Provinsi NTB dengan pihak media.



Gambar 18 Media Visit

- h. Media Workshop dengan tema "Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB Semester II Tahun 2018 " yang diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2018. Acara Media Workshop ini mengundang rekan-rekan dari media cetak seperti Lombok Post, Suara NTB, Radar Lombok. Media elektronik seperti TVRI, TV9, Lombok TV, Mataram News, RRI Mataram, Global FM, Inews TV dan media online seperti Garda Asakota, Suara NTB.com.



Gambar 19 Media Workshop 12 Desember 2018

7. IK 3.2.7 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

IK ini bertujuan agar sarana dan prasarana kerja yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh pegawai.

Realisasi tingkat pemenuhan sarana dan prasarana tahun 2018 sebesar 93,14% dimana telah melebihi target yang ditetapkan di tahun 2018 yaitu sebesar 93%.



Gambar 20 Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTB

G. S 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan

1. IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

IK ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan.

Realisasi persentase pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan pemeriksa tahun 2018 adalah 100% atau sebanyak 42 pemeriksa dari 42 pemeriksa di Perwakilan Provinsi NTB. Capaian ini telah memenuhi target tahunan yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

2. IK 3.3.2 Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (non pemeriksa)

IK ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja pengembangan kompetensi pegawainya melalui pendidikan dan pelatihan.

Realisasi persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa) tahun 2018 adalah 100% atau sebanyak 35 non pemeriksa dari 35 non pemeriksa di Perwakilan Provinsi NTB. Capaian ini telah memenuhi target tahunan 2018 yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

H. S 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan

IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan

Ik ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Sasaran strategis ini merupakan upaya BPK Perwakilan Provinsi NTB dalam mendukung pengelolaan keuangan BPK yang efisien, efektif dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

Realisasi tingkat kinerja implementasi anggaran di lingkungan Perwakilan tahun 2018 belum diketahui dikarenakan PSMK belum memperoleh hasil penilaian dari Biro Keuangan.

BAB IV PENUTUP

A. Pencapaian Skor Kinerja BPK Perwakilan NTB Secara Umum

LK BPK Perwakilan NTB ini merupakan sumbangan penyusunan LK Auditama Keuangan VI BPK RI sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Secara umum terjadi peningkatan dalam capaian target IKU selama empat tahun terakhir, akan tetapi bila melihat skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB mengalami penurunan sebesar 23,42 yaitu dari 98,37 pada tahun 2017 menjadi 74,95 pada tahun 2018. Penurunan skor kinerja tahun 2018 ini belum memperhitungkan realisasi ke 3 indikator kinerja (1.1.1, 1.1.3, dan 3.4.1) dan tidak terpenuhinya IK 1.1.2.

Perolehan skor kinerja tersebut merupakan formulasi dari skor delapan Sasaran Strategis sebagai berikut.

Sasaran Strategis		Skor
1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	99,63
2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	35,31
3	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	100,00
4	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	101,00
5	Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen, dan Profesional di Lingkungan Perwakilan	86,08
6	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan	99,13
7	Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	100,00
8	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	00,00
SKOR KINERJA		76,49

Tabel 8 Skor Sasaran Strategis BPK Perwakilan NTB Tahun 2018

B. Penyebab Secara Umum Terjadinya Penurunan Skor

BPK Perwakilan Provinsi NTB mengalami penurunan dalam pencapaian skor kinerja pada tahun 2018 dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya. Penurunan skor kinerja tahun 2018 ini belum memperhitungkan realisasi ke 3 indikator kinerja (1.1.1, 1.1.3, dan 3.4.1), dikarenakan belum mendapat hasil penilaian dari Biro Keuangan dan EPP serta tidak terpenuhinya IK 1.1.2 Rasio jumlah LHP kinerja terhadap seluruh LHP dikarenakan kondisi *force majeure* / gempa bumi yang terjadi selama 4 bulan, mulai bulan Juli s.d. Oktober.

C. Kendala Utama Penyebab Terjadinya Penurunan Skor

Kondisi gempa bumi yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Barat selama empat bulan ini lah yang menyebabkan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan revisi RKP sebanyak dua kali terkait mengganti obyek Pemeriksaan Kinerja ke Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

**D. Strategi Pemecahan Masalah Serta Rencana Aksi yang Akan Diambil
Terkait Pemenuhan Target Periode Berikutnya**

BPK Perwakilan Provinsi NTB akan mengevaluasi kinerja Tahun 2018 dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk dapat meningkatkan skor kinerja di tahun yang akan datang. Serta mempertahankan kinerja yang telah sesuai atau melebihi target pada kinerja periode berikutnya. Atas kendala-kendala yang ada, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan melakukan evaluasi ke dalam dan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar target-target yang ada dapat segera tercapai.

Penyusunan LK BPK Perwakilan Provinsi NTB ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.



**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT UNIT ESELON II BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

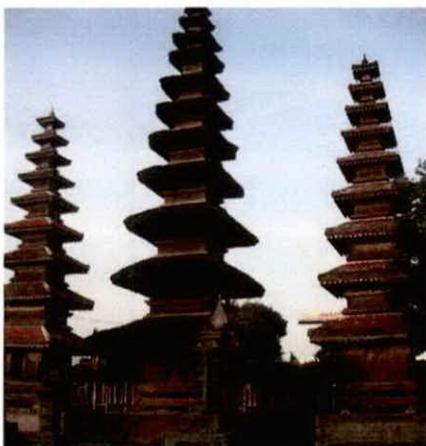
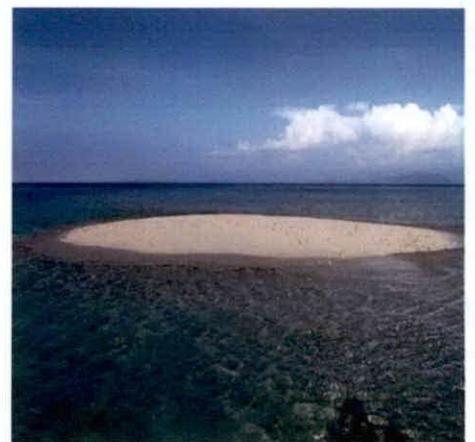
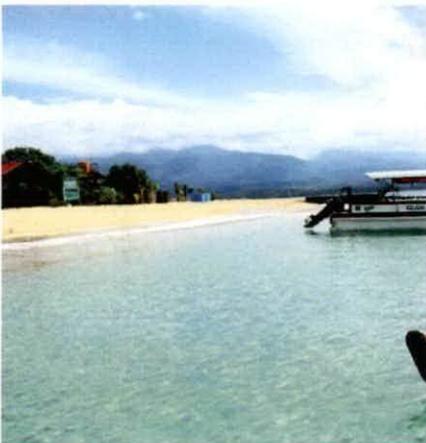
Unit Eselon II : BPK Perwakilan Provinsi NTB
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun 2018
(1)	(2)		(3)		
SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	85%	82,90%	97,53
	1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100,00
	1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	101,00
	1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100,00
S 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%	100%	105,00
	1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	22%	3,23%	14,68
	1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%	0,00%	0,00
S 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100,00
	1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	22	22	100,00
	1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100,00
S 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	2.1.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100,00
	2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,10	4,67	105,00
	2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100,00
	2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%	100,00
S 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen, dan Profesional di Lingkungan Perwakilan	3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	5,00	3,48	69,60
	3.1.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	5,00	4,71	94,20
	3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100,00
S 3.2	3.2.1	Hasil Evaluasi Utama atas	A	BB	88,89

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun 2018
(1)	(2)		(3)		
S 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi NTB	3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	A	BB	88,89
	3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	86,74%	105,00
	3.2.3	Jumlah Usulan Best-Practice	1	1	100,00
	3.2.4	Tingkat Penerapan Best-Practice	100%	100%	100,00
	3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100,00
	3.2.6	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2,00	6,4	105,00
	3.2.7	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	93%	93,14%	100,15
S 3.3.1 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi NTB	3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100,00%	100,00
	3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis.Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100,00%	100,00
S 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi NTB	3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi NTB	85%	0%	0,00

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : Rp19.747.347.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : Rp18.621.384.858,00



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
Jl. Udayana No. 22 Mataram, NTB
Telp. 0370-6163333, Fax. 0370-6162999
www.mataram.bpk.go.id